

STRATEGI DIPLOMASI TNI ANGKATAN LAUT DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN STABILITAS DI LAUT CHINA SELATAN

Mulya Abadi

Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Laut

E-mail: mulyaabadi08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika keamanan Laut China Selatan melalui kerangka SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman), menekankan peran strategis Indonesia yang tercermin melalui Angkatan Laut Republik Indonesia (TNI-AL). Penelitian dilakukan di Jakarta, dimana wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan perwira penentu. Narasumber memiliki pandangan mendalam mengenai operasi, diplomasi maritim, dan kerja sama internasional. Kerangka analitis menggunakan tiga teori utama: (1) teori geopolitik untuk memahami persaingan kepentingan kekuatan besar; (2) teori keamanan maritim untuk menilai interaksi antara kapasitas angkatan laut, alat penegak hukum, dan aktor non-negara; dan (3) teori diplomasi untuk menganalisis bagaimana negosiasi bilateral dan multilateral membentuk tata kelola maritim. Pendekatan metodologis mengacu pada metode kualitatif, meliputi wawancara, studi literatur, serta observasi, guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai diplomasi maritim dan dinamika keamanan regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada jaringan diplomasi maritim yang kuat, kapasitas angkatan laut yang berkembang, serta peran netral dalam ASEAN. Di sisi lain, ancaman berasal dari meningkatnya aktivitas ilegal (seperti penyelundupan dan *illegal fishing*) dan ketegangan geopolitik. Berdasarkan hasil SWOT, penelitian mengusulkan tiga strategi utama: (a) memperkuat kapasitas Indonesia sebagai mediator diplomasi; (b) meningkatkan pengintaian, penegakan hukum, dan respons melalui teknologi canggih seperti radar, satelit, dan kendaraan nir-awak; serta (c) membangun kepercayaan antar negara melalui platform komunikasi digital yang mendukung pertukaran informasi *real-time* guna mewujudkan stabilitas dan pencegahan konflik.

Kata kunci: Laut China Selatan, Diplomasi, Stabilitas Regional, Analisis SWOT

ABSTRACT

This research examines the security dynamics of the South China Sea through a comprehensive SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis, emphasizing Indonesia's pivotal strategic position as manifested by the Indonesian Navy (TNI-AL). The fieldwork was carried out in Jakarta, where semi-structured interviews were conducted with senior officers and policy-makers stationed. These key informants provided insider perspectives on operational doctrines, diplomatic engagements, and mechanisms of international cooperation. The analytical framework integrates three theoretical lenses: (1) Geopolitical theory, to contextualise the contest of great-power interests; (2) Maritime-security theory, to assess the interplay of naval capabilities, law-enforcement assets, and non-state actors; and (3) Diplomacy theory, to explore how bilateral and multilateral negotiations shape maritime governance. Methodologically, the study employs qualitative techniques—interviews, systematic literature review, and participant observation—to capture nuanced insights into maritime diplomacy and regional security dynamics. Findings reveal that Indonesia's chief strengths lie in its robust maritime-diplomacy network, a growing naval force, and its role as a neutral mediator within ASEAN. Conversely, threats stem from proliferating illegal activities (e.g., smuggling, illegal fishing) and escalating geopolitical tensions among claimant states. Based on the SWOT output, the study proposes three strategic priorities: (a) enhance Indonesia's capacity as a diplomatic broker; (b) strengthen surveillance, law-enforcement, and response capabilities through advanced radar, satellite, and unmanned-vehicle technologies; and (c) build trust among regional actors by deploying integrated digital communication platforms that enable real-time information sharing, thereby promoting stability and averting conflict.

Keywords: South China Sea, Diplomacy, Regional Stability, Trust building, SWOT Analysis

A. PENDAHULUAN

Laut China Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan paling strategis di dunia, yang menghubungkan negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Kawasan ini menjadi rute utama bagi kapal-kapal yang mengangkut barang dari Asia Timur menuju Eropa dan sebaliknya, dengan volume perdagangan global yang melewati Laut China Selatan diperkirakan mencapai 20% hingga 33% dari total perdagangan dunia (UNCTAD, 2024). Selain peran vitalnya dalam perdagangan internasional, Laut China Selatan juga kaya akan sumber daya alam, terutama cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Keberadaan sumber daya ini menarik perhatian berbagai negara, baik yang memiliki klaim wilayah langsung maupun yang tidak memiliki wilayah di kawasan tersebut. Namun, potensi ekonomi yang besar ini diiringi oleh dinamika geopolitik yang kompleks, termasuk sengketa klaim wilayah antara China dan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei (Awan, 2023). Ketegangan ini diperparah oleh aktivitas pembangunan pulau buatan dan peningkatan kehadiran militer, yang berpotensi mengganggu stabilitas regional dan keamanan maritim (Koga, 2022). Selain itu, meningkatnya kejahatan transnasional seperti perompakan, penyelundupan, dan perdagangan manusia semakin memperburuk situasi keamanan di perairan ini, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi kelangsungan perdagangan dan stabilitas kawasan (UNODC, 2024) (Hedwards, Bird, & Traxl, 2023).

Meskipun berbagai studi telah mengkaji aspek geopolitik, ekonomi, dan militer di Laut China Selatan, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait peran diplomasi maritim, khususnya strategi yang diterapkan oleh TNI Angkatan Laut dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di kawasan ini. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus

pada analisis konflik wilayah dan dampaknya terhadap ekonomi global, namun belum banyak yang mendalami bagaimana diplomasi militer dapat menjadi instrumen efektif dalam meredam ketegangan dan memperkuat kerjasama antarnegara (Council on Foreign Relations, 2025).



Gambar 1. Peta Ten-Dash Line.

Sumber: <https://www.aspistrategist.org.au/wp-content/uploads/2013/09/combined-map-10-dash.jpg>

Hal ini menjadi sangat penting mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keamanan dan kelancaran jalur pelayaran di Laut China Selatan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan pengetahuan tersebut dengan menelaah secara mendalam strategi diplomasi TNI AL dalam konteks politik, ekonomi, dan militer regional yang dinamis, serta bagaimana strategi tersebut dapat berkontribusi pada stabilitas kawasan.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi baik dari segi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, studi ini akan memperkaya literatur mengenai hubungan antara geopolitik, keamanan maritim, dan diplomasi militer, khususnya dalam konteks konflik wilayah yang kompleks seperti di Laut China Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran strategis kepada TNI Angkatan Laut dan pemangku kebijakan terkait untuk membuat strategi diplomasi yang efektif untuk mengatasi masalah keamanan maritim, termasuk konflik

klaim wilayah dan kejahatan transnasional. Metode yang menyeluruh ini sangat penting untuk mewujudkan stabilitas yang berkelanjutan di wilayah tersebut dan memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga dalam menghadapi perubahan geopolitik yang terus-menerus. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan pembuat kebijakan di bidang pertahanan dan hubungan internasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada strategi diplomasi TNI Angkatan Laut dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di Laut China Selatan. Daftar pertanyaan yang diajukan meliputi: bagaimana bentuk strategi dinamika politik, ekonomi, dan militer regional di kawasan Laut China Selatan; bagaimana pengaruh konflik di Laut China Selatan terhadap kepentingan nasional Indonesia; serta bagaimana strategi diplomasi TNI AL berkontribusi dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di kawasan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk strategi dinamika politik, ekonomi, dan militer regional, mengkaji pengaruh konflik terhadap kepentingan nasional Indonesia, serta merumuskan strategi diplomasi TNI AL yang efektif dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di Laut China Selatan. Dengan fokus yang jelas ini, penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran diplomasi militer dalam konteks keamanan maritim yang kompleks.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim di kawasan Laut China Selatan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang strategi diplomasi TNI Angkatan Laut, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif

dalam menghadapi tantangan seperti konflik wilayah, kejahatan transnasional, dan persaingan geopolitik yang intens. Penelitian ini juga dapat membantu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri mengoptimalkan diplomasi maritim sebagai bagian dari strategi nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada upaya praktis dalam mendukung terciptanya stabilitas dan keamanan yang saling menguntungkan untuk negara-negara di Laut China Selatan, yang pada akhirnya mendukung kelangsungan perdagangan global dan perdamaian regional.

Urgensi penelitian ini menjadi penting mengingat dinamika geopolitik yang semakin memanas di Laut China Selatan, di mana pembangunan pulau buatan, peningkatan kehadiran militer, serta sengketa klaim wilayah antara China dan negara-negara ASEAN meningkatkan risiko konflik yang dapat mengganggu stabilitas regional. Pada saat yang sama, ancaman keamanan maritim transnasional seperti perompakan, penyelundupan, dan perdagangan manusia semakin mengganggu kelancaran jalur perdagangan utama yang melintasi perairan Laut China Selatan. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan kepentingan langsung dalam menjaga keamanan pelayaran, perlu mengoptimalkan peran TNI Angkatan Laut sebagai aktor diplomasi maritim yang proaktif. Dengan demikian, penelitian yang mengkaji strategi diplomasi TNI-AL tidak hanya mengisi kekosongan ilmiah tentang hubungan antara geopolitik, keamanan maritim, dan diplomasi militer, tetapi juga menyediakan landasan kebijakan praktis bagi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat kepercayaan, menurunkan ketegangan, dan memastikan stabilitas serta keberlanjutan rantai pasokan global yang sangat bergantung pada perairan ini.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utama untuk menggali dan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam dan kontekstual (Handoko, Wijaya, & Lestari, 2024). Metode kualitatif dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan mampu menangkap kompleksitas dinamika sosial, politik, dan militer yang terkait dengan strategi diplomasi TNI Angkatan Laut di Laut China Selatan (Sari, Lestari, & Kusuma, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan detail melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian serta analisis dokumen dan observasi lapangan, sehingga temuan penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang masalah yang diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari para pejabat dan praktisi TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam kegiatan diplomasi maritim, sementara objek penelitian adalah strategi diplomasi yang diterapkan oleh TNI AL dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di Laut China Selatan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari sumber yang memiliki wawasan dan pengalaman langsung terkait topik penelitian. Objek penelitian difokuskan pada aspek-aspek strategis yang mencakup dimensi politik, ekonomi, dan militer dalam konteks diplomasi maritim, sehingga analisis dapat dilakukan secara menyeluruh dan terarah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, studi literatur, dan observasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman terkait diplomasi maritim dan

keamanan kawasan Laut China Selatan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat valid dan relevan. Studi literatur meliputi kajian terhadap dokumen, jurnal, buku, dan sumber-sumber tertulis lain yang mendukung pemahaman teoritis dan kontekstual. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan dinamika yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan praktik diplomasi dan operasi militer di wilayah penelitian. Kombinasi ketiga metode ini bertujuan untuk memperkaya data dan memperkuat validitas temuan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari wawancara akan diolah menggunakan metode triangulasi sumber. Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk menentukan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada penelitian. Dari hasil analisis SWOT selanjutnya dirumuskan strategi diplomasi TNI Angkatan Laut dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di Laut China Selatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan triangulasi sumber, diperoleh aspek SWOT dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Strengths (Kekuatan)

- 1) Kekuatan militer Indonesia dalam pelaksanaan operasi dan patroli di Laut Natuna Utara.
- 2) Penekanan pada pentingnya posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.
- 3) Penggunaan data dan teknologi informasi terkini.

b. Weaknesses (Kelemahan)

- 1) Penanganan konflik wilayah masih secara parsial.
- 2) Kepentingan nasional masih menjadi prioritas dibandingkan kepentingan kawasan.
- 3) Keterbatasan informasi dalam penanggulangan kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan.

c. Opportunities (Peluang)

- 1) Kesempatan memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan perbatasan.
- 2) Pengembangan strategi penanggulangan kejahatan lintas negara yang lebih terintegrasi dan efektif.
- 3) Peluang pengembangan diplomasi militer dan penegakan hukum di wilayah perbatasan yang rawan konflik dan kejahatan.

d. Threats (Ancaman)

- 1) Meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perompakan, dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan.
- 2) Ketegangan geopolitik dan persaingan kekuatan besar yang dapat memperumit upaya penegakan hukum dan diplomasi.
- 3) Risiko eskalasi konflik militer atau non-militer yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan jalur perdagangan internasional.

Dari faktor SWOT diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan faktor internal dan faktor eksternal sesuai dengan penilaian dari narasumber, dihasilkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Faktor Internal

No	Kekuatan dan Kelemahan	Rangking					Jml	Nilai	Bobot
		STP	TP	CP	P	SP			
		0	.25	.5	.75	1			
A	Strengths								
1.	(S1) Kekuatan Militer	0	0	0	1	4	5	0.48	0.18
2.	(S2) Posisi Strategis	0	0	0	2	3	5	0.45	0.17
3.	(S3) Teknologi Informasi Meningkat	0	0	0	2	3	5	0.45	0.17
B	Weaknesses								
1.	(W1) Penanganan Konflik Secara Parsial	0	0	0	3	2	5	0.43	0.16
2.	(W2) Kepentingan Nasional	0	0	0	4	1	5	0.40	0.15
3.	(W3) Keterbatasan Informasi	0	0	0	3	2	5	0.43	0.16
JUMLAH								2.63	1.000

Tabel 2. Perhitungan Faktor Eksternal

No	Peluang dan Ancaman	Rangking					Jml	Nilai	Bobot
		STP	TP	CP	P	SP			
		0	.25	.5	.75	1			
A	Oportunities								
1.	(O1) Kerjasama Bilateral	0	0	0	2	3	5	0.45	0.17
2.	(O2) Pengembangan Strategi Operasi	0	0	0	2	3	5	0.45	0.17
3.	(O3) Pengembangan Diplomasi Militer	0	0	0	4	1	5	0.40	0.15
B	Threats								
1.	(T1) Ancaman Kejahatan	0	0	0	1	4	5	0.48	0.18
2.	(T2) Ketegangan Geopolitik	0	0	0	3	2	5	0.43	0.16
3.	(T3) Resiko Eskalasi	0	0	0	2	3	5	0.45	0.17
JUMLAH								2.65	1.000

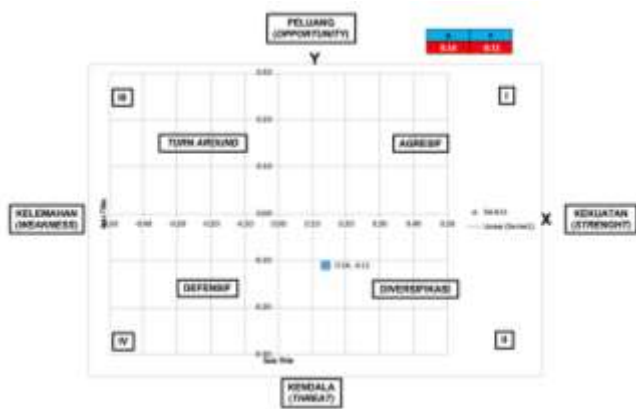
Dari faktor internal dan eksternal dihasilkan perhitungan IFAS dan EFAS sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan IFAS dan EFAS

NO	IFAS	Bobot	Rating	Skor
S	Strengths			
1.	(S1) Kekuatan Militer	0.18	4	0.72
2.	(S2) Posisi Strategis	0.17	4	0.69
3.	(S3) Teknologi Informasi Meningkat	0.17	2	0.31
	Total Strength			1.72
W	Weaknesses			
1.	(W1) Penanganan Konflik Secara Parsial	0.16	2	0.32
2.	(W2) Kepentingan Nasional	0.15	4	0.61
3.	(W3) Keterbatasan Informasi	0.16	4	0.65
	Total Weaknesses			1.58
	TOTAL	1.000		

NO	EFAS	Bobot	Rating	Skor
O	Oportunities			
1.	(O1) Kerjasama Bilateral	0.17	4	0.68
2.	(O2) Pengembangan Strategi Operasi	0.17	4	0.68
3.	(O3) Pengembangan Diplomasi Militer	0.15	2	0.24
	Total Opportunities			1.60
T	Threats			
1.	(T1) Ancaman Kejahatan	0.18	4	0.72
2.	(T2) Ketegangan Geopolitik	0.16	3	0.48
3.	(T3) Resiko Eskalasi	0.17	3	0.51
	Total Threats			1.71
	TOTAL	1.000		

Nilai IFAS dan EFAS dikonversi ke dalam kuadran SWOT untuk mendapatkan strategi yang akan digunakan untuk membangun kepercayaan dan stabilitas di Laut China Selatan.



Gambar 2. Kuadran SWOT

Dari perhitungan diatas diperoleh strategi yang digunakan adalah strategi Strengths-Threats dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di Laut China Selatan. Tiga strategi ST tersebut adalah:

a. Strategi ST 1: Memperkuat peran Indonesia sebagai inisiator dalam usaha diplomasi maritim untuk meredam ketegangan geopolitik Indonesia memiliki posisi geo-strategis yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara, khususnya sebagai negara kepulauan terbesar yang menjadi penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan kekuatan ini, Indonesia dapat mengambil peran sentral sebagai inisiator dan mediator dalam diplomasi maritim regional. Strategi ini menekankan pentingnya Indonesia untuk aktif memimpin forum-forum multilateral, seperti ASEAN dan mekanisme dialog maritim, guna mendorong terciptanya dialog konstruktif antarnegara yang bersengketa di Laut China Selatan. Melalui pendekatan diplomasi yang inklusif dan transparan, Indonesia dapat membangun kepercayaan bersama dan mengurangi ketegangan geopolitik yang berpotensi memicu konflik. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan jaringan diplomatiknya untuk menggali dukungan internasional terhadap prinsip-prinsip hukum laut dan

penyelesaian sengketa secara damai, sehingga memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas kawasan.

b. Strategi ST 2: Memanfaatkan posisi strategis dan kemampuan militer untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di Laut China Selatan.

Sebagai negara dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang strategis, terutama di sekitar wilayah Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Strategi ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas militer, khususnya TNI Angkatan Laut, untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan tersebut. Indonesia dapat mencegah pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pelanggaran kedaulatan dengan meningkatkan kehadiran militernya melalui patroli teratur dan latihan bersama dengan negara sahabat. Ini juga dapat dicapai melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan dan teknologi pengawasan seperti radar dan satelit. Selain itu, peningkatan kemampuan militer ini juga berfungsi sebagai sinyal tegas kepada aktor-aktor eksternal bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya, sehingga dapat meredam potensi eskalasi konflik yang disebabkan oleh persaingan kekuatan di kawasan.

c. Strategi ST 3: Menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan rasa saling percaya antar negara dan menghindari risiko eskalasi konflik

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi menjadi alat strategis yang sangat efektif untuk membangun transparansi dan kepercayaan antarnegara di kawasan Laut China Selatan. Strategi ini menekankan pemanfaatan teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit, radar maritim, dan kecerdasan buatan (AI) untuk menyediakan data real-time mengenai aktivitas kapal dan pergerakan militer di wilayah perbatasan.

Dengan adanya platform komunikasi digital, potensi miskomunikasi dan kesalahpahaman yang dapat memicu konflik dapat diminimalisir. Selain itu, teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman atau insiden yang berpotensi menimbulkan ketegangan, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat segera diambil. Teknologi informasi dapat membantu diplomasi dan meningkatkan kerja sama regional dalam pengelolaan keamanan maritim, yang menghasilkan stabilitas dan perdamaian jangka panjang.

2. Pembahasan

Laut China Selatan merupakan arena geopolitik yang sangat strategis karena menjadi jalur utama menghubungkan daratan Eurasia dengan kawasan lain di dunia. Dalam kerangka teori Halford Mackinder, meskipun wilayah ini tidak termasuk langsung dalam Heartland, penguasaan laut ini dapat menjadi pintu gerbang mengontrol akses ke Heartland. Kontrol atas Laut China Selatan memberikan posisi strategis bagi negara yang menguasainya untuk memengaruhi jalur perdagangan global yang vital. China mengklaim wilayah tersebut melalui “Nine-Dash Line” dan memanfaatkan letak geografisnya untuk memperluas pengaruh regional sekaligus global. Pendekatan Mackinder menekankan pentingnya wilayah penyangga dan jalur laut sebagai kunci dominasi geopolitik. Kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat melihat wilayah ini sebagai titik kunci dalam upaya menjaga tatanan internasional yang terbuka. Oleh karena itu, persaingan di Laut China Selatan menjadi pertarungan antara kekuatan darat dan laut. Ketegangan yang muncul mencerminkan upaya masing-masing negara untuk mengamankan posisi strategisnya di panggung dunia. Secara keseluruhan, penguasaan wilayah ini memengaruhi keseimbangan kekuasaan global di masa depan.

Friedrich Ratzel memandang negara sebagai organisme yang membutuhkan

Lebensraum atau ruang hidup untuk bertahan dan berkembang. Dari sini, ekspansi China di Laut China Selatan dapat dilihat sebagai upaya natural untuk memperoleh ruang hidup yang lebih luas. Pembangunan pulau buatan dan penguatan fasilitas militer oleh China merupakan contoh konkrit dari dorongan ekspansi tersebut. Wilayah ini tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga kaya akan sumber daya alam yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Persaingan dengan negara-negara tetangga yang juga mengklaim hak atas wilayah yang sama menambah intensitas konflik. Ratzel menafsirkan perebutan wilayah ini sebagai “perjuangan hidup dan mati” bagi kelangsungan negara. Konflik yang muncul mencerminkan benturan kepentingan intrinsik antara kebutuhan ruang hidup dan keamanan nasional. Ekspansi China sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan dominasi sepihak yang dapat mengancam stabilitas regional. Dengan demikian, dinamika di Laut China Selatan melibatkan dimensi biologis, ekonomi, dan politik yang saling terkait.

Zbigniew Brzezinski menempatkan Eurasia sebagai pusat gravitasi kekuatan dunia modern. Laut China Selatan berperan sebagai arena utama dalam pertarungan strategi global yang digambarkan Brzezinski. Amerika Serikat berupaya menyeimbangkan kekuasaan dengan operasi kebebasan navigasi dan kehadiran militer di wilayah tersebut. ASEAN berperan sebagai mediator multilateral yang berupaya menjaga kestabilan dan membangun norma hukum internasional. Penguatan kerjasama regional serta diplomasi multilateral menjadi bagian penting dalam strategi Brzezinski. Persaingan antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan mencerminkan dinamika multipolar dunia saat ini. Keseimbangan kekuatan di kawasan ini memengaruhi kebijakan luar negeri dan keamanan global secara luas. Karena itu, pendekatan Brzezinski memberikan kerangka analitik untuk memahami interaksi antara kekuatan regional dan global.

Menggabungkan ketiga teori tersebut memberikan pemahaman multidimensional tentang konflik di Laut China Selatan. Penguasaan wilayah ini tidak hanya soal militarisasi, melainkan juga tentang kebutuhan ruang hidup, kontrol jalur perdagangan, dan keseimbangan kekuatan global. Dampak ekonomi sangat signifikan karena laut ini merupakan jalur perdagangan utama dunia dan kaya akan sumber daya alam. Gangguan stabilitas di kawasan dapat menimbulkan konsekuensi luas bagi rantai pasokan dan pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, strategi diplomasi yang cermat, kesabaran, dan komitmen bersama diperlukan untuk mencegah eskalasi militer. Pendekatan multilateral, termasuk peran aktif ASEAN dan forum internasional, menjadi kunci dalam menciptakan solusi damai. Kesadaran akan dimensi geopolitik, ekonomi, dan biologis dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Upaya bersama untuk menegakkan norma hukum laut dan mekanisme penyelesaian sengketa akan memperkuat stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan benturan kepentingan di Laut China Selatan menjadi prasyarat penting bagi keamanan dan kemakmuran dunia.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menempati posisi strategis yang sangat penting dalam geopolitik maritim global, terutama terkait Laut China Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional vital yang dilaluinya secara langsung. Kedudukan geografisnya yang berada di persimpangan jalur maritim antara Asia, Australia, dan Samudra Hindia menjadikannya sebagai penjaga utama keamanan dan kelancaran arus pelayaran global. Peran Indonesia dalam menjaga stabilitas wilayah laut sangat menentukan, karena setiap gangguan di Laut China Selatan berpotensi mengganggu keamanan energi, rantai pasok global, dan keberlangsungan ekonomi nasional. Keamanan maritim bukan hanya soal pertahanan militer,

tetapi juga mencakup pengawasan, penegakan hukum, serta kolaborasi regional yang sinergis. Dengan demikian, Indonesia harus memastikan bahwa kekuatan lautnya tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga proaktif dalam menjaga kestabilan kawasan. Pendekatan yang komprehensif dalam melindungi wilayah maritim nasional akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara.

Teori Buerger memberikan kerangka penting dalam memahami ancaman maritim sebagai fenomena multidimensional yang melampaui konflik bersenjata konvensional, mencakup aspek ekonomi, politik, ekologi, dan sosial budaya. Dalam konteks Indonesia, ancaman seperti eksploitasi sumber daya alam ilegal, pencurian ikan, serta pencemaran laut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan kestabilan sosial di kawasan pesisir. Pendekatan Buerger mendorong penguatan *maritime domain awareness* (MDA), sistem deteksi dini, dan koordinasi lintas sektor antara instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pesisir untuk merespons ancaman secara holistik. Dengan mengadopsi perspektif ini, Indonesia dapat mengintegrasikan aspek pertahanan, ekonomi, dan keadilan sosial ke dalam kebijakan keamanan maritim yang lebih tahan banting. Kerangka multidimensi ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat pesisir sebagai penjaga laut, menciptakan budaya keamanan maritim yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan keamanan laut Indonesia sangat bergantung pada pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika kompleks di laut.

Teori Klein menekankan pentingnya kerja sama regional dan kolaborasi politik-militer dalam membangun stabilitas maritim, khususnya dalam konteks ASEAN yang menjadi wadah utama untuk pendekatan kolektif terhadap isu keamanan laut. Indonesia, sebagai pemain kunci di kawasan, memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat mekanisme pertahanan

maritim kolektif melalui dialog terbuka, patroli bersama, dan pertukaran intelijen maritim dengan negara-negara tetangga. Dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan, pendekatan diplomasi preventif dan penguatan kerja sama bilateral mulai dari ASEAN ke tingkat kawasan seperti Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) menjadi strategi yang vital untuk mencegah eskalasi konflik. Penguatan kerja sama dengan kekuatan maritim besar seperti Amerika Serikat dan Cina—meskipun dengan kepentingan yang berbeda—diperlukan untuk membangun keseimbangan kekuatan yang stabil. Kerangka Klein menjadikan Indonesia sebagai pemain strategis yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi pembangun kepercayaan dan jaringan keamanan maritim yang kuat. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai negara kepulauan untuk memfasilitasi dialog dan solusi damai yang berkelanjutan.

Teori Hoffman tentang *deterrence* atau penangkalan strategis menekankan bahwa keberhasilan keamanan maritim tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer semata, tetapi juga oleh kesiapan intelijen, surveilans dini, dan komunikasi diplomatik yang efektif. Indonesia harus meningkatkan kapabilitas TNI AL melalui modernisasi alutsista, pembangunan pangkalan maritim strategis, serta integrasi teknologi canggih seperti radar, satelit, dan sistem AI untuk deteksi dini ancaman. Selain itu, diplomasi militer dan kemitraan pertahanan dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, dan AS menjadi alat penting untuk memperkuat efek *deterrence*. Pendekatan ini sejalan dengan konsep “force in readiness” yang tidak menunggu konflik tetapi sudah siap menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, teori Mahan menegaskan bahwa dominasi laut merupakan fondasi utama dari kekuasaan global, dan bagi Indonesia, ini berarti bahwa pengelolaan jalur laut strategis harus menjadi prioritas tinggi. Dengan mengintegrasikan konsep Mahan, Indonesia bukan hanya menjaga

kedaulatan melalui militer, tetapi juga membangun kekuatan komparatif melalui infrastruktur maritim, logistik, dan keterlibatan ekonomi global yang saling mendukung. Keseluruhan pendekatan ini menempatkan Indonesia sebagai aktor maritim yang tangguh, proaktif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan zaman.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kedudukan strategis yang sangat penting dalam geopolitik maritim global, terutama terkait Laut China Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional vital. Indonesia menghadapi beragam tantangan mulai dari sengketa wilayah, perompakan, hingga eksploitasi sumber daya alam ilegal yang jika tidak dikelola secara komprehensif dapat mengganggu stabilitas nasional. Pendekatan multidimensional yang diusulkan Buerger menghendaki penguatan institusi *maritime domain awareness* (MDA), penegakan hukum, serta diplomasi strategis yang koheren dengan kebijakan nasional. Hal ini menegaskan bahwa keamanan laut Indonesia adalah cerminan dari keharmonisan antara aspek pertahanan, ekonomi, diplomasi, dan pelibatan masyarakat pesisir. Maka, Indonesia harus mempertahankan keutuhannya bukan hanya lewat kemampuan militer, tapi juga dengan membangun sistem pengelolaan risiko yang tangguh. Selain itu, ruang laut harus menjadi wadah sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar keamanan maritim dapat mendukung kesejahteraan rakyat. Karena itu, kebijakan keamanan maritim Indonesia harus inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global. Dengan demikian, pendekatan Buerger memberikan kerangka kerja yang sangat aplikatif untuk mengatasi ancaman maritim kontemporer yang kompleks. Indonesia, sebagai aktor kunci, harus bergerak proaktif di level regional maupun global untuk menjaga kedaulatan maritimnya.

Teori Klein menambah dimensi penting lain dalam keamanan maritim Indonesia dengan menekankan bahwa stabilitas dan keamanan

wilayah laut sangat ditentukan oleh kemampuan negara-negara pesisir berkolaborasi secara politik dan militer. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran utama untuk memperkuat mekanisme keamanan kolektif dengan membangun dialog terbuka dan patroli bersama di perairan strategis. Indonesia, harus mengedepankan strategi diplomasi preventif yang melibatkan pelibatan aktif dalam forum-forum regional dan global, termasuk memperkuat kerja sama dengan Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara lain di kawasan. Kemampuan memperkuat kerjasama pertahanan bersama, berbagi informasi intelijen maritim, serta penegakan aturan adalah pilar utama yang akan menjaga keamanan kawasan. Indonesia harus mengedepankan kebijakan “*active diplomacy*” yang efektif agar konflik kawasan tidak berdampak pada keselamatan jalur laut serta sumber daya. Pendekatan ini juga penting dalam mengharmonisasikan kepentingan nasional dengan kepentingan regional agar tercipta stabilitas berkepanjangan. Dengan kata lain, penguatan kerjasama bilateral dan multilateral harus menjadi prioritas agar ancaman maritim dapat diminimalisir secara kolektif. Efektivitas teori Klein terlihat jika Indonesia mampu membangun jejaring pertahanan maritim yang kuat dan handal. Ini akan memastikan Laut China Selatan tidak berubah menjadi zona konflik yang destruktif bagi Indonesia dan kawasan.

Perspektif teori geopolitik Mackinder menekankan bahwa kontrol atas “jantung dunia” memberi keunggulan politik dan ekonomi. Sementara itu, teori Mahan menyoroti pentingnya kekuatan laut untuk mengamankan jalur maritim vital. Letak geografis Indonesia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik menjadikannya penyangga utama stabilitas kawasan. Sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini menambah nilai strategis bagi negara. Keterbatasan ruang laut Indonesia menuntut pengelolaan yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Indonesia harus menjadi penjaga utama kedaulatan wilayah perairan. Penguatan

basis militer dan patroli menjadi unsur penting dalam mempertahankan kontrol fisik. Upaya ini sekaligus menolak klaim sepihak seperti Nine-Dash Line yang mengganggu kedaulatan.

Strategi ST1 berfokus pada penguatan basis militer di Natuna dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Patroli intensif dilakukan untuk memastikan kehadiran fisik Indonesia di wilayah sengketa. Teknologi pengawasan mutakhir, seperti UAV dan radar maritim, meningkatkan kemampuan deteksi dini. Sistem ini memungkinkan respons cepat terhadap ancaman potensial. Kontrol wilayah secara efektif mengurangi peluang tindakan agresif dari pihak lain. Pendekatan hard power ini selaras dengan teori keamanan maritim Buerger dan Klein yang menekankan perlunya kontrol fisik. Selain menahan klaim Nine-Dash Line, strategi ini juga melindungi jalur pelayaran komersial penting. Dengan demikian, ST1 menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.

Strategi ST2 menempatkan diplomasi maritim sebagai instrumen utama untuk meredam ketegangan. Pendekatan ini mengacu pada teori diplomasi militer Kissinger dan Berridge yang memandang angkatan laut sebagai alat diplomasi strategis. Indonesia aktif menyelenggarakan forum dialog bilateral dan multilateral di kawasan. Latihan bersama serta hotline komunikasi dibangun untuk penanganan insiden secara cepat. Upaya ini menciptakan mekanisme kepercayaan dan pencegahan konflik militer. Dari perspektif Brzezinski, diplomasi maritim membantu menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Teori keamanan maritim Graham menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran tetap terbuka dan aman. Diplomasi proaktif ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator netral yang kredibel. Hasilnya, ketegangan dapat dikelola secara damai tanpa eskalasi militer.

Strategi ST3 mengoptimalkan kerja sama regional ASEAN sebagai basis menghadapi kejahatan transnasional di laut. Pendekatan

kolektif ini mencerminkan teori keamanan maritim Klein yang menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara. Pusat koordinasi keamanan maritim ASEAN dibentuk untuk patroli gabungan dan pertukaran intelijen. Latihan bersama meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme angkatan laut anggota. Kerja sama ini sejalan dengan pemikiran Mahan tentang aliansi regional sebagai kekuatan penahan. Sinergi ketiga strategi menghasilkan kerangka kerja komprehensif yang menggabungkan hard dan soft power. Integrasi basis militer kuat, diplomasi maritim, dan aliansi regional memperkuat posisi Indonesia dan ASEAN di panggung global. Dengan pendekatan seimbang, kawasan dapat tetap stabil meski tekanan geopolitik terus meningkat. Oleh karena itu, implementasi ST1, ST2, dan ST3 menjadi kunci utama keberlanjutan perdamaian dan keamanan Laut China Selatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sengketa batas wilayah di Laut China Selatan menjadi isu geopolitik strategis karena tumpang-tindih klaim terutama Nine-Dash Line milik Tiongkok serta kepentingan ekonomi dan militer yang besar. Laut ini merupakan jalur pelayaran internasional utama dan kaya sumber daya alam, menjadikannya arena persaingan kekuatan regional dan global. Militerisasi meningkat dengan patroli intensif, pembangunan pangkalan, dan penggunaan teknologi canggih, yang secara signifikan meningkatkan risiko eskalasi konflik. Diplomasi maritim dan kerja sama ASEAN tetap menjadi instrumen penting untuk meredakan ketegangan, mencegah konflik bersenjata, dan menjaga keamanan lintas-samudra.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki peran krusial dalam stabilitas wilayah. Kepulauan Natuna dan ZEE-nya berada di titik rawan klaim sepihak yang mengancam kedaulatan, pengelolaan sumber

daya, serta kemandirian ekonomi nasional. Oleh karena itu, TNI AL harus menegakkan kontrol fisik dan hukum secara konsisten, memperkuat kehadiran militer, serta memanfaatkan teknologi penginderaan dan UAV untuk deteksi dini. Pendekatan berbasis UNCLOS memperkuat posisi tawar hukum Indonesia.

Berdasarkan analisis SWOT, TNI AL mengadopsi tiga strategi utama: (1) Penguatan Pengawasan dan Kontrol melalui peningkatan basis militer di Natuna dan pemanfaatan teknologi canggih; (2) Mereduksi Ketegangan lewat dialog, hotline militer, dan latihan bersama ASEAN serta negara lain; (3) Koordinasi Regional dengan pusat koordinasi ASEAN, patroli gabungan, dan pertukaran intelijen real-time. Sinergi hard power, soft power, dan network power ini tidak hanya melindungi kedaulatan nasional, tetapi juga menegaskan Indonesia sebagai aktor bertanggung jawab dalam menjaga keamanan maritim regional.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran antara lain:

TNI Angkatan Laut perlu memperkuat pengawasan dan kontrol wilayah secara berkelanjutan di perairan Natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), khususnya melalui peningkatan kehadiran militer, patroli intensif, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti radar maritim, satelit pengintai, dan UAV untuk deteksi dini ancaman. Kolaborasi dalam patroli bersama dengan negara-negara ASEAN dan kekuatan maritim global seperti AS dan Jepang menjadi strategi penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah eskalasi konflik. Latihan militer bersama harus dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas, kesiapan respons cepat, serta komunikasi darurat. Di samping itu, TNI AL harus aktif dalam diplomasi militer, mengembangkan pusat

koordinasi intelijen maritim, dan menegaskan klaim wilayah berbasis UNCLOS untuk memperkuat posisi hukum.

Integrasi strategi pertahanan maritim ke dalam kebijakan nasional yang komprehensif dengan sinergi antarmatra darat, laut, dan udara menjadi kunci. Doktrin operasional harus disesuaikan dengan dinamika geopolitik, serta koordinasi antarinstansi militer diperkuat untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas. Partisipasi aktif dalam diplomasi pertahanan, pelatihan bersama, dan pertukaran strategi dengan negara sahabat sangat krusial. Modernisasi armada laut dan sistem pengawasan maritim mutakhir harus menjadi prioritas, didukung anggaran dan dukungan politik yang memadai.

Kementerian Luar Negeri Indonesia perlu memperkuat diplomasi hukum maritim berbasis UNCLOS, mempercepat kemitraan multilateral melalui ASEAN, dan membangun jalur komunikasi efektif antara diplomasi militer dan sipil untuk respons cepat dan koordinatif terhadap ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Awan, S. H. (2023). SOUTH CHINA SEA: THE CHINESE APPROACH. *Margalla Papers*, 44-59.
- BBC. (2023, Juli 7). *What is the South China Sea dispute?* Retrieved Maret 2, 2025, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349>
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bueger, C. (2015). What is Maritime Security? *Marine Policy*, 1-5.
- Buzan, B. (1991). People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. *International Security*, 5-46.
- Council on Foreign Relations. (2025, Januari 3). *China's Maritime Disputes*. Retrieved Maret 6, 2025, from <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes>
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5423-5443.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 34-46.
- Graham, E. (2013). *Maritime Security: An Introduction*. London: Routledge.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hedwards, B., Bird, L., & Traxl, P. (2023). *Maritime people smuggling and its intersection with human trafficking in South and South East Asia*. Geneva: Global Initiative.
- Hoffman, B. (2006). The Maritime Dimension of International Security. *Naval War College Review*, 1-20.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1-9.
- Kissinger, H. (2011). The Future of Diplomacy. *Foreign Affairs*, 1-12.
- Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. *International Journal of Marine and Coastal Law*, 1-20.

- Koga, K. (2022). *Four Phases of South China Sea Disputes 1990–2020*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Mackinder, H. J. (2004). The Geographical Pivot of History. *The Geographical Journal*, 298-310.
- Mahan, A. T. (2004). *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. New York: Dover Publications.
- Mearsheimer, J. J. (1990). Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. *International Security*, 5-56.
- Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. *Harvard Business Review*, 107-114.
- Mulyana, A., Vidiati, C., & Danarahmanto, P. A. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Nye, J. S. (2008). *The Powers to Lead*. New York: Oxford University Press.
- Porter, M. E. (1996). What is Strategy? *Harvard Business Review*, 61-78.
- Presiden RI. 2017. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Sekteraris Kabinet RI. Jakarta
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rathbun, B. C. (2008). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 1-20.
- Ratzel, F. (2013). The History of Mankind. *Geopolitics*, 123-145.
- Rumelt, R. P. (2011). *Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters*. New York: Crown Business.
- Santoso, S., Kusnanto, E., & Saputra, M. R. (2022). Perbandingan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif serta aplikasinya dalam penelitian akuntansi interpretatif. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 351-360.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., & Kusuma, D. W. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Malang: Unisma Press.
- Teguh, M. T., Wulan, T. N., & Juansah, D. E. (2023). Teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif pada metode penelitian. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5962-5974.
- Tzu, S. (2005). *The Art of War Translated by Ralph D. Sawyer*. Boulder: Westview Press.
- UNCTAD. (2024). *International Maritime Trade*. Geneva: UNCTAD.
- UNODC. (2024). *Transnational Organized Crime in the Pacific: Expansion, Challenges and Impact*. Vienna: UNODC.
- Uren, D. (2020, Desember 8). *Southeast Asia will take a major economic hit if shipping is blocked in the South China Sea*. Retrieved Maret 6, 2025, from <https://www.visionofhumanity.org/conflict-in-the-south-china-sea-analysing-the-economic-toll/>
- Walt, S. M. (1991). The Renaissance of Security Studies. *International Studies Quarterly*, 211-239.